

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, dan dijelaskan juga pada pasal 1 ayat (11) SAP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah wajib menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP. Penggunaan Laporan Keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Sampai saat ini, pemerintah telah dua kali menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah. Pertama, PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diawali dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kedua, PP Nomor 71 Tahun 2010, yang merupakan peraturan yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun dengan berlandaskan pada penggunaan basis akrual (*accrual Basis*). SAP berbasis akrual telah diterapkan oleh pemerintah daerah diseluruh Indonesia sejak tahun 2015. PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa:

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2012:10), “Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadinya atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengakuan sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas”. Sedangkan menurut Tickell, Geoffrey (2010:9), “akuntansi berbasis akrual merupakan transaksi yang diakui pada saat pendapatan dihasilkan dan saat telah terjadinya beban”.

Sesuai SAP berbasis akrual, entitas pelaporan harus dapat menyajikan tujuh jenis Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dalam PSAP dikelompokkan ke dalam dua kelompok laporan yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang masih menggunakan basis kas dan laporan kelompok finansial yang sudah menggunakan basis akrual. Dalam laporan finansial terdapat Laporan Operasional (LO) yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Sampai saat ini pemerintah telah mengeluarkan tiga belas PSAP. Pada Tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan PSAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) menyebutkan bahwa:

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Sejalan dengan dikeluarkannya PSAP No 13 maka BLU harus mulai menerapkan SAP berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun anggaran 2016. Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layanan Umum mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), kecuali diatur tersendiri dalam PSAP Nomor 13. PSAP Nomor 13 menyatakan bahwa ada tujuh komponen Laporan Keuangan BLU yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2.1.1.1 Badan Layanan Umum

2.1.1.1.1 Pengertian Badan Layanan Umum

Definisi Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. Dengan demikian, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan seperti pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa serta kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan pemerintah pusat sehingga laporan keuangan yang disajikan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaporan keuangan BLU selaku pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, Satker BLU wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) . Laporan keuangan dimaksud memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05 /2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan Satker BLU sesuai PSAP 13 disusun dan disajikan untuk kebutuhan pelaporan keuangan bertujuan umum, dan selanjutnya dapat digunakan, baik untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang membawahi secara vertikal Satker BLU maupun untuk analisis dan penyusunan laporan keuangan yang lebih khusus dengan tujuan tertentu .

BLU adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran
5. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan
6. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga
7. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya
8. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dan
9. Laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLU adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

2.1.1.1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum utama yang mendasari pembentukan dan operasional BLU adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 401/KMK.05/2010 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

2.1.1.1.3 Tujuan dan Asas BLU

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di beberapa bidang, seperti layanan kesehatan, pendidikan, otoritas tertentu dan sebagainya. Birokrasi pemerintah yang biasa dikenal tidak efisien, tidak efektif dan lambat dalam memberikan layanan terhadap masyarakat akan diubah bentuknya menjadi Badan Layanan Umum, agar lebih fleksibel dan responsif dalam memberikan layanan. Selaras dengan tujuannya, BLU memiliki beberapa asas sebagai berikut:

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
2. BLU merupakan bagian perangkat yg pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga sebagai instansi induk.
3. Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga.
5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga.
7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis sehat

2.1.1.1.4 Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan BLU

Menurut PMK Nomor 220/PMK.05/2016, “Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU”. Penyusunan Laporan Keuangan BLU dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum sesuai dengan SAP berbasis akrual. Kebijakan akuntansi BLU yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU mengikuti ketentuan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU (SA BLU) merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi pada kementerian negara/lembaga (SAI) , dan untuk menjalankan SA BLU tersebut perlu dibentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di satker BLU. UAKPA secara umum melaksanakan sistem, subsistem dan prosedur akuntansi atas kejadian transaksional, dan mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLU secara periodik dalam kerangka SAI, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan data pada Laporan Keuangan BLU, Satker BLU melakukan rekonsiliasi data dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SAI, UAKPA di satker BLU secara khusus dapat menyelenggarakan dan mengembangkan sub-sistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik pelayanan BLU . Sub-sistem akuntansi secara mandiri tersebut dikembangkan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan dan akuntansi berdasarkan dokumen sumber yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BLU secara transaksional . Penyelenggaraan dan pengembangan sub –sistem akuntansi secara mandiri termasuk prosedur dan sub-sistem akuntansi transaksional, bagan akun standar,

dan dokumen sumber yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan laporan keuangan BLU sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Kegiatan transaksi yang berhubungan dengan sub- sistem akuntansi secara mandiri, termasuk prosedur dan sub-sistem akuntansi transaksional, bagan akun standar transaksional, dan dokumen sumber transaksional, merupakan fase *input*. Data yang dihasilkan dari fase input diselaraskan untuk dapat diproses pada fase *process*, baik secara format dokumen pengesahan, bagan akun standar, jurnal standar, laporan keuangan, maupun format data dalam arsip data komputer. Hasil utama dari proses bisnis SA BLU ini adalah laporan keuangan BLU yang bertujuan umum yang meliputi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas BLU, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan memperhatikan bahwa Sistem Akuntansi BLU merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Instansi, terdapat proses bisnis untuk membantu menggabungkan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan tingkat eselon I dan tingkat kementerian negara/lembaga yang membawahi BLU. Dalam hal ini Kemenristek membawahi Universitas Sriwijaya dan Kemenag membawahi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Secara umum proses bisnis sistem SA BLU yang dilakukan oleh UAKPA BLU dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Keterangan :

1 . *Mapping* akun

- a. Bukti-bukti internal atas transaksi BLU seperti kuitansi, faktur, dokumen penagihan, bon, dan lain-lain bukti transaksi yang dipersamakan dibukukan oleh petugas yang memiliki fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan secara periodik dalam rangka proses pengesahan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - b. Pencatatan atau pembukuan transaksi ekonomi oleh petugas akuntansi dan pelaporan keuangan ke dalam sub-sistem akuntansi internal BLU dapat dikembangkan secara mandiri oleh BLU dalam rangka mendukung penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU.
 - c. Bukti-bukti dan/atau pembukuan dari petugas akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator/validator untuk memastikan keselarasan akun-akun pengesahan yang digunakan. Penyelarasan akun tersebut merupakan proses konversi atau mapping akun-akun transaksional secara internal BLU ke dalam akun-akun sesuai dengan Bagan Akun Standar yang diatur oleh Menteri Keuangan.
 - d. Proses konversi (*mapping*) akun-akun tersebut dituangkan dalam dokumen Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang dipersamakan dalam rangka pembentukan dokumen transaksi proses pengesahan pada KPPN.
2. Pembuatan Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pengeluaran Kas atau yang Dipersamakan
- a. Dilakukan dalam rangka proses pengakuan dan pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU pada KPPN, yang secara kas telah diterima dan/atau dikeluarkan oleh BLU.
 - b. Format dokumen Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pengeluaran Kas atau yang dipersamakan dapat dibuat sesuai dengan kemandirian dan kebutuhan masing-masing BLU. Namun demikian, secara substansi dokumen tersebut sekurang kurangnya harus menyajikan akun internal

BLU dan jumlahnya serta hasil *mapping* (akun sesuai BAS) beserta jumlahnya.

3 . Penyimpanan Data Transaksi Harian BLU

- a. Bentuk, format dan kebutuhan penyimpanan data transaksi harian BLU disesuaikan dengan kemandirian BLU.
 - b. Data transaksi harian BLU (database BLU) tersebut digunakan untuk keperluan pada fase *process*, yaitu:
 - i. Proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU pada KPPN dengan interaksi menggunakan aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satker) dan
 - ii. Proses pencatatan jurnal manual/penyesuaian atas transaksi-transaksi akrual untuk penyajian laporan keuangan semesteran dan tahunan , dengan interaksi menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual).
4. Perekaman resume data transaksi harian BLU ke dalam Aplikasi SAS. Dalam rangka perekaman dokumen SP3B-BLU (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja-BLU) untuk pengesahan pendapatan dan belanja BLU secara kas pada KPPN.
 5. Penerbitan SP3B-BLU. Hasil verifikasi dan validasi secara internal BLU terhadap perekaman transaksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU secara kas dalam aplikasi SAS, satker BLU menerbitkan SP3B - BLU.
 6. Penyampaian SP3B-BLU ke KPPN mitra kerja Penyampaian SP3B - BLU oleh Satker BLU kepada KPPN mitra kerja dapat dilakukan secara periodik dan/atau sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengesahan transaksi BLU.
 7. Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU secara kas oleh KPPN. Berdasarkan SP3B-BLU yang diajukan oleh Satker BLU, KPPN mitra kerja menerbitkan SP2B-BLU dan disampaikan ke Satker BLU untuk dokumentasi akuntansi dan administrasi.
 8. Perekaman SP2B-BLU. Dokumen dan data SP2B-BLU yang diterima dari KPPN dilakukan perekaman melalui aplikasi SAIBA dengan dua cara, yaitu :

- a. Dokumen SP2B-BLU (nomor SP2B-BLU) dicatat pada aplikasi SAS untuk mempermudah penarikan data transaksi secara otomatis oleh aplikasi SAIBA pada proses selanjutnya; atau
 - b. Dokumen SP2B-BLU (nomor SP2B-BLU) dicatat secara manual pada aplikasi SAIBA untuk mengakomodasi perlakuan database aplikasi SAS tidak terkoneksi dengan database aplikasi SAIBA.
9. Penarikan Data Transaksi oleh Aplikasi SAIBA.
 10. Proses pada Aplikasi SAIBA. Data hasil penarikan dari Aplikasi SAS disimpan dalam database Aplikasi SAIBA. Data ini akan digabungkan dengan data lain hasil penginputan jurnal manual dan data transaksi hasil kiriman Aplikasi SIMAK BMN. Seluruh data kemudian diproses membentuk buku besar, neraca percobaan, dan komponen laporan keuangan BLU.
 11. Penyediaan Data untuk Keperluan Jurnal Manual. Tidak seluruh data transaksi diproses melalui dokumen SP3 B -BLU. Transaksi-transaksi penyesuaian maupun koreksi hanya dapat dilakukan melalui penginputan jurnal manual berupa jurnal penyesuaian, jurnal koreksi dan/atau jurnal balik. Data untuk melakukan jurnal manual ini disuplai melalui database atau buku pembantu transaksi periodik BLU yang dikembangkan secara mandiri.
 12. Memo Penyesuaian. Transaksi periodik yang direkam dengan jurnal manual berupa jurnal penyesuaian, jurnal koreksi dan/ atau jurnal balik dituangkan dalam dokumen akuntansi berupa Memo Penyesuaian.
 13. Jurnal manual/penyesuaian. Atas dasar Memo Penyesuaian, dilakukan penginputan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA.
 14. Rekonsiliasi Data. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang di proses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Proses ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan . Dalam hal terjadi perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perbedaan.

15. Memperbarui (*Updating*) Data. Apabila hasil rekonsiliasi mengharuskan adanya perbaikan data, maka perlu dilakukan perbaruan (*updating*) data pada SAIBA.
16. Penelaahan dan Reviu Draft Laporan Keuangan. Data Laporan Keuangan yang telah melewati proses rekonsiliasi masih perlu ditelaah dan direviu lagi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas penyajian laporan keuangan. Proses penelaahan dapat dilakukan secara periodik dan mandiri oleh petugas akuntansi dan atasannya. Selain ditelaah, Laporan Keuangan BLU direviu oleh SPI-BLU dan / atau oleh APIP.
17. Penyusunan Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BLU terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Laporan Keuangan BLU yang disajikan tersebut merupakan pertanggungjawaban keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang diberikan kemandirian pengelolaan keuangan.
18. Proses Eliminasi Transaksi. Dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian, baik oleh entitas atau kementerian negara/ lembaga yang membawahi BLU maupun oleh entitas penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) , Satker BLU melakukan proses eliminasi dan membuat laporan atau kertas kerja eliminasi terhadap akun-akun transaksi antar-entitas pemerintah pusat . Proses eliminasi dimaksud dilakukan setelah penyusunan Laporan Keuangan BLU .
19. Penyusunan Kertas Kerja Eliminasi dan Penyampaian LK BLU ke Entitas yang Membawahi BLU.
 - a. Kertas kerja eliminasi yang dibuat satker BLU dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian oleh entitas yang membawahi BLU.
 - b. Penyampaian kertas kerja eliminasi ini dilakukan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan BLU.
 - c. Laporan Keuangan BLU yang utama disampaikan disajikan secara utuh tanpa ada eliminasi transaksi.

- d. Dalam hal diperlukan untuk analisis dan konfirmasi data, Satker BLU dapat menyajikan Laporan Keuangan BLU yang telah menyertakan penyajian eliminasi.

Aturan terkait jurnal umum yang digunakan oleh BLU dalam proses akuntansi tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

2.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Sedarmayanti (2001:5), “sumber daya manusia adalah tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan”. Pengertian lain dikemukakan oleh Hasibuan (2000:3), “sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut”. Menurut Nawawi (2005:40), ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu:

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
- b. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

Menurut Danim (1996:44), “kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan)”. Pengertian lain dikemukakan oleh Salim (1996:35), “kualitas sumber daya manusia adalah nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa”.

Menurut Matutina (2001:205), kualitas sumber daya manusia mengacu pada:

1. Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan.
2. Keterampilan (*Skill*), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan.
3. *Abilities* yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu staff keuangan di BLU, karena staff keuangan merupakan SDM yang mengetahui mengenai penerapan SAP berbasis akrual di BLU. Staff keuangan di BLU Perguruan Tinggi terdiri dari pegawai BLU PNS dan pegawai BLU Non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut dimungkinkan karena BLU dapat mempekerjakan tenaga profesional non PNS dengan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

2.1.4 Ketersediaan Sistem Informasi

Menurut Mukhtar (2002:2):

Sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah *computer based system*, yang dapat diartikan integrasinya peralatan, program, data, dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer. Kesuksesan suatu sistem membutuhkan tujuan-tujuan yang terdefiniskan. Suatu sistem dengan tujuan tertentu akan menyelesaikan lebih banyak untuk suatu organisasi, daripada sistem tanpa tujuan, sedikit tujuan, atau tujuan yang ambisius.

“Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat” (Bodnar dan Hopwood, 1996:1). Menurut Susanto (2004:46), “informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat”. Informasi memiliki nilai ekonomis jika ia dapat membantu dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya, jadi informasi dapat membantu sistem untuk mencapai tujuannya.

Menurut Nash, John F. (1995:8):

Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Selanjutnya menurut O' Brien (2005:5):

Sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun dari *people* (orang), *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak), *computer networks and data communications* (jaringan komunikasi), dan *database* (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi.

Dari pengertian tersebut sistem informasi menunjukkan bahwa fungsi utamanya adalah menyediakan informasi sebagai penunjang yang membantu proses perencanaan, pengendalian serta fungsi manajemen. Dengan demikian, maka segala bentuk proses pekerjaan rutin maupun transaksi manajemen akan tertata dengan rapi. Teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai untuk melaksanakan SAP berbasis akrual diharapkan dapat membantu BLU dalam melaksanakan tugasnya. Sistem informasi juga harus didukung oleh penggunaan teknologi informasi yang tepat. Menurut Jurnal dan Supomo (2002:204), untuk mengukur sistem informasi dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi dengan indikator sebagai berikut:

1. Perangkat yaitu ketersediaan komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas, jaringan internet yang telah terpasang pada unit kerja, jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan, proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
2. Pengelolaan data keuangan yaitu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mampu beradaptasi dengan pengguna, mampu menyediakan data yang akurat, mampu menyediakan data yang saling terkait, adanya pelatihan untuk peningkatan kualitas pengguna, adanya pendampingan dalam operasional sistem informasi.
3. Perawatan yaitu adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur, peralatan yang rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

BLU dalam menyusun laporan keuangan telah dibekali oleh Kementerian Keuangan sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan yang telah terintegrasi. Sistem informasi yang digunakan oleh staff keuangan BLU meliputi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Akuntansi Satker (SAS), Aplikasi pencetakan SPM, SP2B, SP3B, dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara.

2.1.5 Komitmen Organisasi

Menurut Robins (2006:310), “komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu”. Selanjutnya, menurut Robbins dalam Sjabadhyni dkk (2001:456) memandang komitmen organisasi merupakan salah satu sikap kerja, karena ia merefleksikan perasaan seseorang (suka atau tidak suka) terhadap organisasi tempat ia bekerja. Hal ini didefinisikan sebagai suatu orientasi individu terhadap organisasi yang mencakup loyalitas, identifikasi, dan keterlibatan. Jadi komitmen organisasi merupakan orientasi hubungan aktif antara individu dan organisasi. Orientasi hubungan tersebut mengakibatkan individu atas kehendak sendiri bersedia memberikan sesuatu dan sesuatu yang diberikan itu menggambarkan dukungannya bagi tercapainya tujuan organisasi. BLU perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah berkomitmen untuk menerapkan SAP berbasis akrul untuk menyusun laporan keuangan BLU. Hal ini ditandai dengan telah diterapkannya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU sesuai dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016.

Buchanan dalam Azman, Tengku (2015:8), mendefinisikan “komitmen adalah sebagai penerimaan karyawan atas nilai-nilai organisasi (*identification*), keterlibatan secara psikologis (*psychological immersion*), dan loyalitas (*affection attachment*)”. Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling mendorong (*reinforce*) antara satu dengan yang lain. Komitmen organisasi diukur dengan indikator rasa memiliki terhadap organisasi, keterlibatan dalam organisasi

secara utuh, loyalitas terhadap tujuan organisasi, profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi beban tugas dan tanggung jawabnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Populasi/Sampel	Variabel	Kesimpulan
1.	I Wayan Gede Putra dan Dodik Ariyanto/2015	Populasi: seluruh sekretaris dan kepala bidang dari seluruh SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Sampel: Setiap SKPD diambil sampel 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Sekretaris, dan 1 orang Staff	Variabel dependen: Penerapan SAP Berbasis Akrual Variabel independen: a. Kualitas Sumber Daya Manusia, b. Komunikasi, c. Komitmen Organisasi d. Gaya Kepemimpinan	Kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
2.	Elsa Rosiana/2016	Populasi: seluruh pegawai bagian keuangan sebanyak 40 pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Sampel: semua populasi dijadikan sampel.	Variabel dependen: Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Variabel independen: a. Kualitas Sumber daya manusia, b. Teknologi informasi .	secara parsial tidak ada pengaruh signifikan teknologi informasi terhadap penerapan laporan keuangan berbasis akrual dan secara parsial diketahui terdapat pengaruh signifikan kualitas SDM

				terhadap penerapan laporan keuangan berbasis akrual.
3.	Ida Bagus Gede Bayu Permana dan I Dewa Nyoman Wiratmaja/2016	<p>Populasi: seluruh pegawai di pusat Pemerintahan Kab.Badung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 5658 pegawai.</p> <p>Sampel: seluruh pegawai golongan II/a sampai dengan IV/d pada bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Badung ditetapkan pegawai berstatus PNS dan golongan II/a sampai dengan IV/d.</p>	<p>Variabel dependen: Penerapan PP NO. 71 Tahun 2010</p> <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Sistem Informasi. 	Kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan PP No. 71 Tahun 2010.
4.	Fadhillah Asri/2015	<p>Populasi: PNS yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru</p> <p>Sampel: PNS Kota Pekanbaru yang menjadi kepala dan staf sub bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan SKPD Kota Pekanbaru.</p>	<p>Variabel dependen: Penerapan SAP Berbasis Akrual</p> <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Perangkat Pendukung 	Secara parsial membuktikan bahwa variabel sumber daya manusia dan perangkat pendukung berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual di Pekanbaru dan Secara parsial membuktikan bahwa variabel komitmen

				organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual di Pekanbaru.
5.	Ikrima Chikita Sukadana dan Ni Putu Sri Harta Mimba/2015	<p>Populasi: Seluruh Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan, dan staf akuntansi/pelaporan di satuan-satuan kerja</p> <p>Sampel: Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan, dan staf akuntansi/pelaporan di satuan-satuan kerja yang menjadi populasi.</p>	<p>Variabel Dependen: Penerapan SAP Berbasis Akrual</p> <p>Variabel independen: Kualitas Sumber Daya Manusia</p>	Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual di SKPD kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali
6.	Fadilah Madjid/2016	<p>Populasi: pegawai yang menangani keuangan yang berjumlah 39 orang yang terdapat pada 15 Dinas di Pemerintah Kabupaten Maros</p> <p>Sampel: pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pengeluaran.</p>	<p>Variabel dependen: Penerapan SAP berbasis Akrual</p> <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> komitmen pelaksana pengembangan regulasi sistem informasi kualitas sumber daya manusia 	Komitmen Pelaksana dan Pengembangan Regulasi tidak memengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Namun ketersediaan Sistem informasi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia

				Memengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
7.	Dini Rahmi Hasibuan/2015	Populasi: satuan kerja Pemerintah Kota Medan. Sampel: Pegawai yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi di SKPD, yaitu pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) beserta pegawai / staf yang membantunya.	Variabel dependen: Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual. Variabel independen: a. Sumber Daya Manusia b. Komitmen Organisasi c. Resistensi Terhadap Perubahan d. Komunikasi e. Kualitas Teknologi Informasi f. Dukungan Konsultan	Variabel Sumber Daya Manusia dan Resistensi Terhadap Perubahan berpengaruh positif, tetapi tidak terbukti berpengaruh signifikan. Variabel Komitmen Organisasi dan Dukungan Konsultan berpengaruh positif dan terbukti berpengaruh signifikan. Variabel Komunikasi dan Kualitas Teknologi Informasi berpengaruh negatif dan terbukti berpengaruh signifikan.

Sumber : Data dikumpulkan oleh peneliti (2017)

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Kualitas Staff Keuangan Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Menurut Wiley (2002:2) dalam Azhar (2007), “sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki adalah sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah telah mengeluarkan PSAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan BLU dengan tujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Dalam rangka upaya pencapaian tujuan tersebut maka BLU harus dapat mempersiapkan diri dalam hal membenahi sumber daya manusianya dengan cara memberikan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis. Sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten untuk menerapkan SAP berbasis akrual dengan lancar dan mulus serta juga akan dapat melaksanakan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP Berbasis Akrua dengan baik. Penelitian tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan SAP berbasis akrual pernah diteliti oleh Rosiana (2015) dan Putra dan Ariyanto (2015) yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari sumber daya manusia terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

2.3.2 Pengaruh Ketersediaan Sistem Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Peran teknologi informasi dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan. Calliueot dan Lapayre dalam Handayani (2007:3) menyatakan bahwa “penciptaan suatu informasi yang efektif membutuhkan suatu pengorganisasian untuk

mengembangkan sejumlah sistem-sistem pendukung”. Penarikan pegawai yang kompeten dan layak adalah suatu tindakan yang sangat penting. Investasi yang besar dalam perangkat keras, perangkat lunak dan pendukung sistem yang lain adalah sesuatu yang penting, namun tanpa manusia bersumber daya yang kompeten untuk mengkoordinasikan sistem akan menghasilkan informasi yang tidak layak, tidak tepat waktu atau tidak akurat. Kualitas suatu informasi tergantung dari beberapa hal yaitu akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, dan dapat dimengerti. Ketersediaan sistem informasi yang memadai akan membantu penerapan SAP berbasis akrual di BLU sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan BLU Perguruan Tinggi. Penelitian tentang pengaruh ketersediaan sistem informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual telah diteliti sebelumnya oleh Permana dan Wiratmaja (2016) dan Madjid (2016) yang menemukan adanya pengaruh signifikan positif dari sistem informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

2.3.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

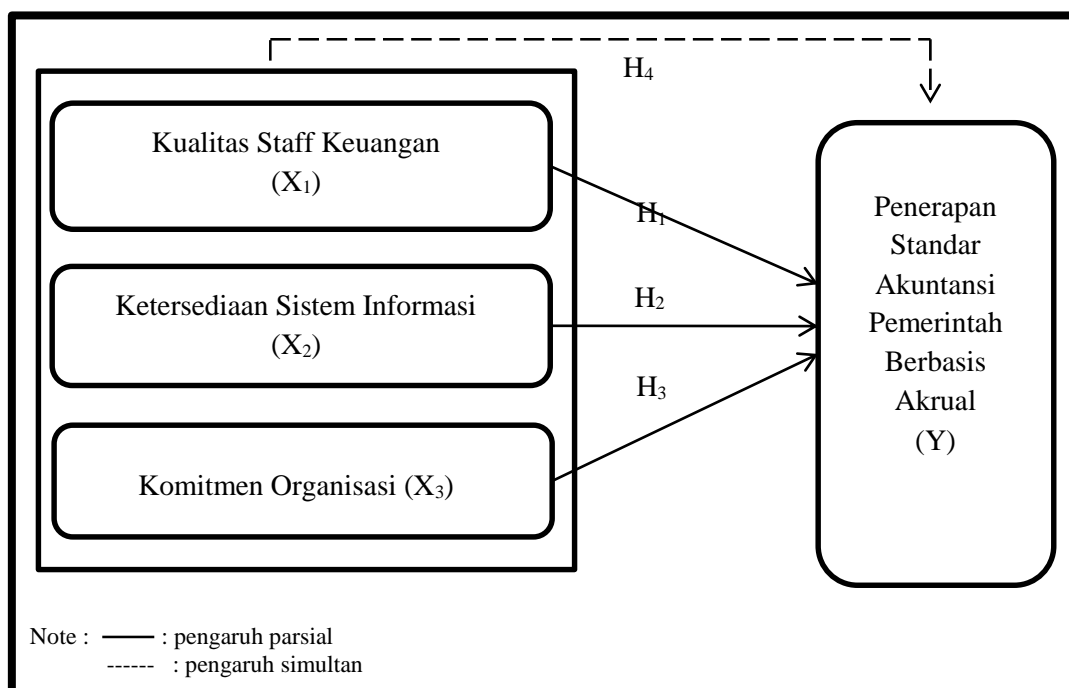
“Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi” (Aldiani,2010:2) . Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan. Bekerja dengan maksimal dalam hal ini antara lain bekerja keras, ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya, senang dan peduli terhadap organisasi tempatnya bekerja. Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi BLU akan tercapai dengan sumbangsih mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan menyebabkan peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja pegawai akan membuat penerapan SAP berbasis akrual di BLU berjalan dengan baik. Penelitian tentang pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual pernah diteliti oleh Putra dan Ariyanto (2015), Permana dan Wiratmaja (2016)

yang menemukan adanya pengaruh positif dari komitmen organisasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

2.3.4 Pengaruh Kualitas Staff Keuangan, Ketersediaan Sistem Informasi dan, Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu belum ada yang meneliti pengaruh ketiga variabel X terhadap variabel Y secara simultan. Oleh karena ini dalam penelitian ini akan menguji pengaruh Kualitas Staff Keuangan, Ketersediaan Sistem Informasi, dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama atau simultan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Penelitian tentang pengaruh Kualitas Staff Keuangan, Ketersediaan Sistem Informasi, dan Komitmen Organisasi secara simultan telah dilakukan oleh Permana dan Wiratmaja (2016) yang menyatakan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAP berbasis akrual.

Menurut Sugiyono (2016:66), “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting” . Penelitian ini membahas dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Faktor-faktor tersebut terdiri atas kualitas staff keuangan, ketersediaan sistem informasi, dan komitmen organisasi. Berdasarkan penjelasan di atas berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Kualitas Staff Keuangan sebagai X_1 , Ketersediaan Sistem Informasi sebagai X_2 dan Komitmen Organisasi sebagai X_3 yang akan mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Y) secara parsial dan simultan.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyanto (2016:70) “ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti ingin menguji hubungan kedua variabel tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Kualitas Staff Keuangan terhadap Penerapan SAP berbasis akrual pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan.
- H_2 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Ketersediaan Sistem Informasi terhadap Penerapan SAP berbasis akrual pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan.

- H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan dari Komitmen Organisasi terhadap Penerapan SAP berbasis akrual pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₄: Terdapat pengaruh yang signifikan dari Kualitas Staff Keuangan, Ketersediaan Sistem Informasi, dan Komitmen Organisasi secara simultan terhadap penerapan SAP berbasis akrual pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan.